

PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP SENJANGAN ANGGARAN DENGAN INFORMASI ASIMETRI, KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS PEMERINTAH PROVINSI BANTEN)

Yulaikah* Trikawati Riffa Ismanti*****

*, **, ***Universitas Faletehan

Article Info

Keywords:

Budget Participation;
Information Asymmetry;
Organization Commitment;
Budgetary Slack

Abstract

This research aims to examine the effect of budget participation on budgetary slack with two moderating variables, namely: information asymmetry and organizational commitment. Inconsistencies in previous studies regarding the effect of NGO participation on budgetary slack became the motivation for this research. Data was collected using a questionnaire to local government Units / OPDs in Banten Province. Respondents were selected using a purposive sampling method where officers involved in the budgeting process, of the 105 questionnaires distributed, 80 questionnaires were returned. The analysis method uses variance-based SEM using Smart PLS 3.0. The research instrument has passed the validity and reliability standards. The research results show that budget participation has an effect on budget slack. This research proves that the interaction between research and asymmetric budget participation information has a negative effect, while organizational commitment significantly budget participation in information asymmetry can increase budgetary slack, otherwise organizational commitment reduces budgetary slack.

Corresponding Author:

Yulaikah.se@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran dengan dua variabel moderasi, yaitu: asimetri informasi dan komitmen organisasi. Inkonsistensi dalam studi sebelumnya tentang pengaruh partisipasi LSM terhadap senjangan anggaran menjadi motivasi dalam penelitian ini. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner kepada Unit / OPD pemerintah lokal di Provinsi Banten. Responden dipilih dengan metode purposive sampling di mana petugas yang terlibat dalam proses penganggaran, dari 105 kuesioner didistribusikan, 80 kuesioner dikembalikan. Metode analisis menggunakan SEM berbasis varian menggunakan Smart PLS 3.0. Instrumen penelitian telah melewati selera validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi

anggaran berpengaruh pada senjangan anggaran. Penelitian ini membuktikan interaksi penelitian dengan informasi partisipasi anggaran asimetri, memiliki efek negatif sedangkan komitmen organisasi secara signifikan partisipasi anggaran pada asimetri informasi dapat meningkatkan senjangan anggaran, jika tidak organisasi komitmen mengurangi senjangan anggaran.

©2023 JSAB. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Saat ini memasuki era reformasi sektor publik, Indonesia menyerukan transparansi dan akuntabilitas publik yang lebih besar dalam pengembangan administrasi publik. Sesuai dengan tuntutan reformasi, UU No. 22 Tahun 1999 (diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004) dan UU No. 25 Tahun 1999 (diganti dengan Undang-Undang Nomor 33) tentang Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah Republik Tajikistan. . 2004) Kajian mengenai perimbangan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan undang-undang ini, sistem nasional yang terpusat akan didesentralisasi dan, khususnya, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah akan tercapai.

Anggaran adalah rencana jangka pendek organisasi yang dinyatakan dalam bentuk keuangan. Anggaran sektor publik yang disajikan dalam APBN dan APBD menggambarkan rencana keuangan masa depan, termasuk pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Anggaran sektor publik memerlukan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran (Mahmudi, 2015).

Tujuan utama dalam pelaporan keuangan organisasi non bisnis seperti unit-unit pemerintahan yaitu untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lain (Taufiqurrohman dkk, 2021). Sistem anggaran pemerintah yang ada saat ini, khususnya sistem anggaran rinci, ditengarai penuh dengan praktik yang tidak efisien. Pendekatan tradisional dalam sistem yang ada adalah menyiapkan anggaran berdasarkan laporan tambahan dan lebih fokus pada apakah kegiatan sudah selesai atau belum. Akuntansi anggaran tidak memperhatikan proporsionalitas penggunaan anggaran terhadap hasil yang diinginkan (achievement), efektivitas bagi masyarakat luas (benefit), dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi makro (impact). Program aktivis dinilai kurang responsif terhadap permasalahan yang ada dan kurang relevan dengan peluang baru (Suartarman, 2016).

Menurut pasal 31. UU No. (1) Pada tanggal 17 Desember 2003, Gubernur/Gubernur/Walikota menyampaikan kepada DPD dalam bentuk laporan keuangan rancangan Perjanjian Daerah mengenai tanggung jawab pelaksanaan APBD (Cortina). Itu diaudit oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam waktu enam bulan setelah akhir tahun anggaran. Anggaran daerah membantu menciptakan lapangan kerja, mengurangi pemborosan sumber daya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian, serta mendorong pemerataan dan efisiensi. Kesopanan. Persoalannya mengenai fungsi distribusi dan fungsi distribusi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara dan sumber daya keuangan daerah. Penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pelayanan masyarakat untuk mencapai tujuan negara (Nordiawan dkk, 2012). Belanja berlebih anggaran (SILPA) merupakan fenomena yang terjadi di Pemerintah Provinsi Banten. Pada APBD bersih tahun 2016, rencana pendapatan daerah Provinsi Banten ditetapkan sebesar

Rp8.005.287.474.000, rencana pendapatan daerah Provinsi Banten setelah perubahan sebesar Rp8.474.950.571.339, dan capaiannya sebesar Rp8.474.950.3391. , atau 102,14%. Anggaran belanja APBD Perubahan Provinsi Banten tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp9.303.525.389.927, yaitu sebesar Rp8.925.813.442.214 atau 95,94%. Jumlah tersebut sebesar Rp8.084.140.158.994 (LKPJ Gubernur Banten pada akhir tahun anggaran 2016), meningkat sebesar 8,81% dari realisasi belanja tahun anggaran 2015. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi akhir pelaksanaan APBD dan rancangan/nota Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Banten tahun anggaran 2016 (tidak diaudit), terdapat sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) sebesar Rp377.711.947.713,- relatif menurun sebesar Rp814.374.251.478,- atau turun 63,36%, bila dibandingkan dengan realisasi SILPA tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.192.151.059.055,- (LKPJ Gubernur Banten akhir tahun Anggaran 2016).

Kerugian No. Provinsi Banten tanggal 21 Oktober 2016. 7, Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016, sesuai dengan cakupan rencana belanja daerah dalam APBD. perubahan adalah Rp9.303.525.389.927 yang terbagi menjadi, anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp5.913.908.501.783,- dan anggaran belanja langsung sebesar Rp3.389.616.888.144,- dalam pelaksanaan kegiatan, alokasi belanja tersebut terserap sebesar Rp8.925.813.442.214,- atau mencapai 95,94% atau terjadi adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) sebesar Rp377.711.947.713,- yang terbagi menjadi, realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp5.835.995.713.865,- atau 98,68 % dari anggaran dan realisasi belanja langsung sebesar Rp3.3089.817.728.352,- atau 91,16% (LKPJ Gubernur Banten tahun anggaran 2016).

Penelitian menunjukkan (Arifin V, 2016) bahwa keterlibatan seluruh tingkatan manajemen mulai dari penyusunan anggaran hingga pelaksanaan anggaran dapat memberikan dampak positif terhadap pencapaian tujuan organisasi. Menurut Young (1985), Afiani (2010), serta Chin dan Feng (2013), partisipasi yang tinggi dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan defisit anggaran besar, dan partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap defisit anggaran. Hal ini dikarenakan bawahan (agen) mengharapkan adanya penurunan pendapatan dan peningkatan pengeluaran untuk memenuhi target anggaran sehingga mengakibatkan defisit anggaran.

Namun, penelitian yang bertentangan menunjukkan bahwa partisipasi anggaran yang tinggi tidak efektif atau membatasi ruang anggaran. Hal ini dikarenakan agen ikut serta dalam penyusunan anggaran dan merasa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan anggaran. Teori keagenan adalah kontrak kerja di mana satu orang atau lebih (prinsipal) memerintahkan orang lain (agen) untuk melakukan jasa atas nama klien dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan terbaik bagi klien. Jika kedua belah pihak mempunyai tujuan yang sama yaitu memaksimalkan nilai perusahaan, agen dianggap bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal. Inti dari teori keagenan adalah kontrak kerja yang dirancang dengan baik dan menyeimbangkan kepentingan prinsipal dan agen. (Supanto, 2010). Praktik mitigasi anggaran melibatkan implikasi teori keagenan yaitu adanya konflik.

Pada tahap perencanaan dan penyusunan APBD, kepentingan antara aparat (eksekutif) dan direksi (legislator) hanya sekedar kepentingan dan tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, hubungan kelembagaan adalah antara bawahan dan bawahan yang melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran daerah melalui pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan atasan bertindak sebagai pelaksana.

memantau. . Ketika anggaran daerah disusun oleh eksekutif sebagai agen dan disetujui oleh legislatif sebagai entitas utama, maka pentingnya peran serta pemerintah daerah adalah OPD (organisasi administrasi publik daerah) ikut serta dalam penyusunan ODA. Para pimpinan ODB berkesempatan untuk menyampaikan usulan terkait pelaksanaan Rencana Kerja Daerah (RWP) sebagai acuan penyusunan Rencana Aksi Anggaran (BAP-OPD). RKA-OPD merupakan dokumen partisipasi anggaran internal terkait penetapan alokasi anggaran daerah dan target kinerja dalam RAPBD yang nantinya menjadi APBD (Abdullah, 2016).

Pendekatan yang tidak terduga terhadap perilaku organisasi adalah bahwa lingkungan yang berbeda menghasilkan perilaku yang berbeda. Teori situasional merekomendasikan untuk menganalisis suatu situasi sebelum mengeksekusi dan menghilangkan suatu perilaku, yang biasanya dilakukan berdasarkan asumsi tentang perilaku tersebut. Menurut Govindarajan (2007), hubungan partisipasi anggaran dengan kekurangan anggaran dapat didekati melalui pendekatan kontijensi (*contingency approach*) yakni, dengan memasukkan variabel-variabel lain yang dapat memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran dan senjangan anggaran. Dalam penelitian ini faktor kontijensi (*contingency approach*) adalah asimetri informasi dan komitmen organisasi.

Menurut teori kelembagaan, partisipasi anggaran merupakan proses kolaboratif antara agen dan pelaku dalam pengambilan keputusan anggaran daerah. Anggaran daerah diselenggarakan oleh kekuasaan eksekutif (pemerintah) dan disetujui oleh legislatif (DPRD). Adapun menurut Pengertian anggaran menurut Nafarin (2017) dalam Mudawanah (2019) yaitu Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa.

Peran serta dalam pemerintahan daerah berarti keterlibatan Satuan Zona (OPD) dalam penyusunan APBD, dan kepala OPD mempunyai kesempatan untuk memberikan rekomendasi pelaksanaan Rencana Kerja Zona (PTR). referensi. Saat menyusun rencana pelaksanaan anggaran (RKA-OPD). RKA-OPD merupakan dokumen partisipasi anggaran internal pemerintah daerah yang terlibat dalam penetapan alokasi anggaran dan target kinerja dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) (kemudian APBD)..(Lis Setyowati, Laula Dwi M, Yulaikah)

Varians anggaran adalah perbedaan antara nilai anggaran yang dinyatakan dan perkiraan perkiraan terbaik dari anggaran proses. Pihak yang mengetahui defisit anggaran adalah pihak yang menyusun anggaran itu sendiri (Suartana, 2014). Manajer cenderung menetapkan anggaran yang mudah dicapai. Tindakan manajer yang menimbulkan defisit anggaran dipengaruhi oleh kebijakan direksi yang mengevaluasi kinerja manajer berdasarkan pencapaian tujuan anggaran. Defisit anggaran disebabkan oleh manajer menyembunyikan informasi pribadi tertentu dari atasan dan dengan sengaja memalsukan informasi yang hanya dapat mereka manfaatkan dengan menjalankan defisit. (Dunk, 1993; Hasanah dan Suartana, 2014)

Menurut (Dunk, 1993; Armaeni, 2012) *Information asymmetry exists only when subordinates' information exceeds that of their superiors*. Artinya Asimetri informasi terjadi ketika bawahan mempunyai lebih banyak informasi dibandingkan atasan mengenai suatu unit organisasi atau pusat tanggung jawab bawahan.

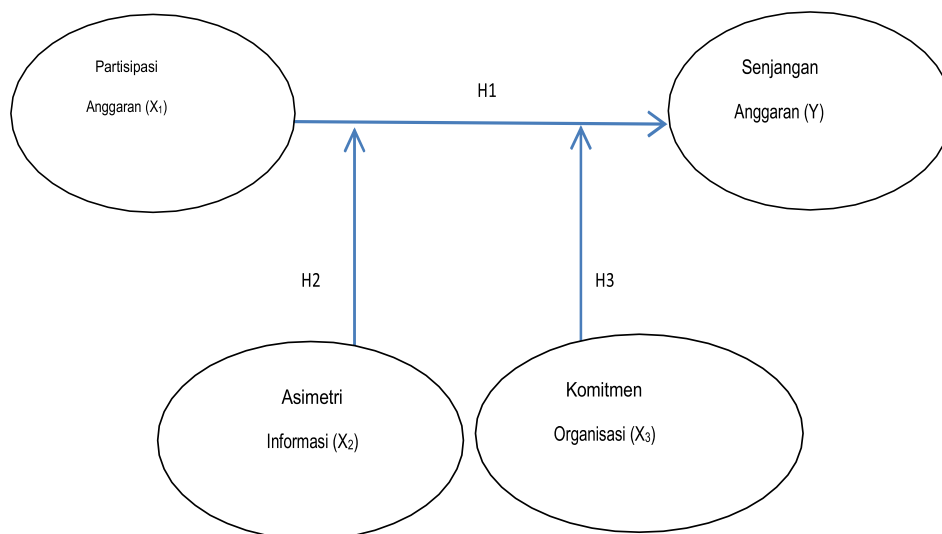
Asimetri informasi mengacu pada situasi dimana seorang pemimpin (subyek) tidak memiliki informasi yang cukup dibandingkan dengan bawahannya (agen) atau sebaliknya. Jika atasan atau CEO mempunyai informasi yang lebih banyak dibandingkan bawahan atau pemimpin pusat pertanggungjawaban, maka tuntutan bawahan untuk memenuhi target anggaran akan tinggi, sehingga akan sangat sulit dicapai oleh bawahan. Ketika bawahan memiliki lebih banyak informasi dibandingkan atasannya, mereka menetapkan tujuan yang lebih rendah daripada tujuan tertinggi yang dapat dicapai. Perbedaan informasi ini disebut asimetri informasi. (Dina, 2010 ; Ardila, 2016).

Komitmen organisasi diartikan sebagai keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota suatu organisasi. Keinginan ini diwujudkan dengan menganut nilai-nilai dan tujuan organisasi tertentu dan melakukan segala upaya atas namanya. Komitmen organisasi dibuktikan dengan kesetiaan karyawan yang berkelanjutan terhadap organisasi demi keberhasilan dan kesejahteraannya (Mowday, et al. 1982; Yunas, 2013). Dalam konteks pemerintahan daerah, pejabat yang sangat terorganisir menggunakan informasi yang tersedia saat ini untuk membuat anggaran mereka relatif lebih akurat. Komitmen organisasi yang tinggi berarti defisit anggaran dapat dihindari. Selain itu, komitmen organisasi merupakan alat psikologis dalam mengelola organisasi untuk mencapai hasil yang diharapkan. (Nouri dan Parker, 1996; Rahmiati, 2013).

Menambah atau mengurangi defisit anggaran bergantung pada apakah individu mengejar kepentingannya sendiri atau bekerja demi kepentingan organisasi. Artinya, komitmen organisasi dapat mempengaruhi hubungan antara partisipasi anggaran dengan defisit anggaran. Sebaliknya orang yang memiliki komitmen rendah lebih mengutamakan dirinya sendiri atau kelompok/organisasinya. Mereka tidak mau memberikan arahan yang lebih baik kepada organisasi dan keterlibatan mereka dalam penyusunan anggaran dapat menyebabkan defisit anggaran. (Latuheru, 2005 Kartika, 2010).

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teoritis, kerangka konseptual penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Model Penelitian



Menurut (Young, 1985; Afianti, 2013), partisipasi yang tinggi dalam proses penyusunan anggaran juga dapat menyebabkan kesenjangan anggaran yang besar. Temuan pengaruh partisipasi anggaran terhadap variasi anggaran masih menunjukkan inkonsistensi antar penelitian. Studi Ihsan La Ane (2007) menemukan bahwa partisipasi yang tinggi dalam penyusunan anggaran meningkatkan defisit anggaran.

Pratama (2008) meneliti bahwa partisipasi anggaran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap defisit anggaran. Yunas (2013) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi

anggaran tidak berpengaruh terhadap defisit anggaran. Sujana (2010), Dunk (1993) dan Supanto (2010) menunjukkan bahwa partisipasi yang tinggi dalam penyusunan anggaran dapat mengurangi terjadinya defisit anggaran. Temuan pengaruh partisipasi anggaran terhadap variasi anggaran masih menunjukkan inkonsistensi antar penelitian. Berdasarkan literatur ini, kami mengembangkan H1 : Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran.

Menentukan anggaran yang tepat tidaklah mudah dan menjadi problematis ketika bawahan mempunyai informasi yang lebih baik dibandingkan yang tersedia bagi manajer (Rani, 2015). Adanya asimetri informasi/perbedaan informasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku buruk (dalam hal ini defisit anggaran). Asimetri informasi terjadi ketika seorang pemimpin mempunyai pengetahuan dan pemahaman lebih banyak dibandingkan bawahannya atau sebaliknya. Peluang pertama mungkin mengakibatkan atasan menuntut atau memotivasi bawahan untuk memenuhi target anggaran yang dianggap bawahan terlalu tinggi. Namun jika Anda mempunyai pilihan kedua, bawahan Anda akan mengatakan bahwa tujuan Anda rendah di mungkinkan untuk dicapai (Suartana, 2010).

Penelitian yang didukung oleh Yang (1985), Utomo (2006), Jasuli dan Fadila (2011), Rahmiati (2013) dan Rianza (2013), menunjukkan bahwa interaksi/hubungan antara penganggaran dan asimetri informasi adalah positif secara signifikan. Tentang keringanan anggaran. . Sebagai agen, manajer menciptakan kekurangan anggaran ketika mereka berusaha mengamankan posisi mereka di pemerintahan (Falihatul, 2007). Berdasarkan tinjauan literatur dan hasil penelitian, karena kinerja agen hanya diukur berdasarkan kinerja anggaran yang memotivasi agen untuk bekerja, maka kesenjangan anggaran dapat terjadi karena asimetri informasi, yaitu ketidakseimbangan informasi antara prinsipal. dan agennya. melayani. Asimetri informasi, ketika berpartisipasi dalam anggaran, agen dapat menyembunyikan beberapa informasi miliknya sehingga menimbulkan kesenjangan dalam anggaran. Dengan kata lain, asimetri informasi dapat mempengaruhi hubungan antara partisipasi anggaran dengan defisit anggaran. Berdasarkan literatur ini, kami mengembangkan H2 : Asimetri informasi memoderasi/memperkuat pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran.

Orang dengan keterlibatan rendah memprioritaskan diri mereka sendiri atau kelompoknya. Ia tidak ingin memberikan arahan yang lebih baik kepada organisasinya yang dapat mengakibatkan defisit anggaran (Kartika, 2010). Komitmen organisasi merupakan motivasi individu untuk melakukan sesuatu guna menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuannya dan mengutamakan kepentingan organisasi (Wierner, 1982; Pratama, 2013).

Komitmen organisasi diperlukan karena merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan organisasi atau usaha dalam proses penganggaran dengan menggunakan metode penganggaran partisipatif yang mengakibatkan terjadinya defisit anggaran. Organisasi tingkat tinggi untuk semua yang terlibat dalam proses persiapan untuk meminimalkan kemungkinan kekurangan anggaran. (Bahar, 2014). Berdasarkan literatur tersebut, maka terdapat H3 : Komitmen organisasi memoderasi pengaruh partisipasi anggaran dengan senjangan anggara

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah entitas pengelola keuangan di 43 (empat puluh tiga) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau seluruh aparat/pejabat struktural pada Eselon II, III, dan IV pada Pemerintah Provinsi Banten, dimana entitas pengelola keuangan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjumlah 9 (sembilan) orang di 43 OPD Pemerintah Provinsi Banten terdiri dari Kepala OPD, Kabag/Kabid. Perencanaan Pelaksanaan dan analisis data, Kabag/Kabid. Pengendalian dan pelaksana, kabag/kabid bendahara dan anggaran, Kasubag/kasubid Keuangan, kasubag/kasubid perbendaharaan, kasubag/kasubid Pengeluaran dan Pelaksana Akuntansi, kasubag/kasubid tata usaha. Teknik pengambilan sampel menggunakan

metode purpose sampling Jadi sampel pada penelitian ini adalah 7 (tujuh) orang di 15 (lima belas) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah provinsi Banten. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner.

Varians anggaran, yaitu selisih antara jumlah anggaran yang ditetapkan dan perkiraan anggaran akurat terbaik yang dapat dibuat. (Suratana, 2014). Indikator yang digunakan untuk mengukur Senjangan Anggaran yaitu (a).Kemampuan memonitor biaya. (b).Kemampuan dalam mencapai anggaran. (c).Mendorong pening katan efisiensi. Masing- masing pernyataan diukur dengan skala Likert 1- 5.

Ini adalah proses kolaboratif antara agen dan direktur dalam mengambil keputusan anggaran daerah. Anggaran daerah diselenggarakan oleh kekuasaan eksekutif (pemerintah) dan disahkan oleh kekuasaan legislatif (DPRD). (Abdullah,2012). Indikator yang digunakan untuk mengukur Partisipasi Anggaran yaitu (a). Kemampuan memberikan pendapat dalam penyusunan anggaran. (b). Frekuensi memberikan pendapat /usulan tentang anggaran kepada atasan. (c). Frekuensi atasan meminta pendapat ketika anggaran disusun. (d). Kontribusi dalam penyusunan anggaran. Masing-masing pernyataan diukur dengan skala Likert 1- 5.

Ketika bawahan memiliki informasi lebih dibanding atasan mengenai suatu unit organisasi atau pusat pertanggung jawaban bawahan (Dunk, 1992; Armaeni, 2012). Indikator yang digunakan untuk mengukur Asimetri Informasi yaitu (a). Kecukupan informasi. (b). Kualitas informasi yaitu yang mampu memenuhi kebutuhan kualitas informasi. (c). Kuantitas informasi yaitu informasi yang mampu memenuhi kebutuhan banyaknya informasi. (d). Pemahaman informasi. Masing-masing pernyataan diukur dengan skala Likert 1- 5.

Keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. Keinginan tersebut diungkapkan dengan menganut nilai-nilai dan tujuan organisasi tertentu serta melakukan segala upaya atas nama organisasi dengan keyakinan tertentu. (Mowday,et al 1982 ; Yunas, 2015). Indikator yang digunakan untuk mengukur Komitmen Organisasi yaitu (a). Kebanggaan terhadap organisasi tempat bekerja. (b). Kebanggaan menjadi bagian organisasi (c). Pengaruh organisasi dalam berprestasi. (d). Kepedulian terhadap masa depan organisasi. (e). Penilaian pegawai terhadap organisasi. Masing- masing pernyataan diukur dengan skala Likert 1- 5.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik Structural Equation Modeling (SEM) yang dapat menganalisis variabel laten yang dibuat dengan indikator reflektif yaitu dapat dilihat dengan *loading factor* untuk setiap indikator konstruk (Mudawanah dkk, 2023) dan morfologi untuk melengkapi analisis regresi berganda ketika muncul permasalahan tertentu dan metode Partial Least Squares (PLS) dengan menggunakan software SmartPLS. digunakan. Penggunaan data, seperti ukuran sampel penelitian, data yang hilang, dan multikolinearitas.

Estimasi parameter yang diperoleh dengan menggunakan PLS dapat dibagi menjadi tiga kategori: Pertama, kami memperkirakan bobot yang digunakan untuk menghasilkan skor variabel laten. Kedua, menunjukkan estimasi jalur antar variabel laten dan antara variabel laten dengan indikatornya (loading). Ketiga, mengacu pada mean dan lokasi parameter (konstanta regresi) untuk indikator dan variabel laten.

Menguji hipotesis dapat dilihat dari nilai t- statistik dan nilai *probabilitas*. Untuk pengujian hipotesis menggunakan nilai statistik maka untuk *alpha* 5% nilai t-statistik yang digunakan adalah

1,96. Sehingga kriteria penerimaan/penolakan hipotesis menggunakan probabilitas maka H_a diterima jika nilai $p < 0,05$. Apabila data-data telah memenuhi syarat setelah melakukan evaluasi atas model pengukuran (*measurement model*), maka tahap berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap *structural model*, yaitu tahap pengujian hipotesis untuk mendapatkan hasil apakah signifikan atau tidaknya berpengaruh pada variabel eksogen terhadap *endogen* melalui pengujian : 1. *Path coefficients*, yang digunakan untuk menguji arah (positif atau negatif) dan untuk menguji besarnya nilai p atau *loading factor*, dan 2. Pengujian besarnya pengaruh berdasarkan nilai *koefisien determinasi* (r^2).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif dimaksud untuk menganalisa data berdasarkan atas hasil yang diperoleh dari jawaban responden terhadap masing-masing indikator mengukur variabel. Dari hasil data statistik deskriptif diatas yang diperoleh, variabel pertama partisipasi anggaran menunjukkan nilai rata-rata 3,58 dengan standar deviasi 0,95 dan dengan nilai jawaban reponden antara 1-5.

Dalam hal ini para pejabat eselon IV dan Eselon III bagian penganggaran setuju bahwa partisipasi sangat dibutuhkan dalam penyusunan anggaran. Asimetri informasi menunjukkan nilai rata-rata 3,88 dengan standar deviasi 0,83 dan dengan nilai jawaban reponden antara 1-5. Dalam hal ini para pejabat eselon IV dan Eselon III bagian penganggaran setuju bahwa Asimetri informasi sangat berpengaruh pada penyusunan anggaran.

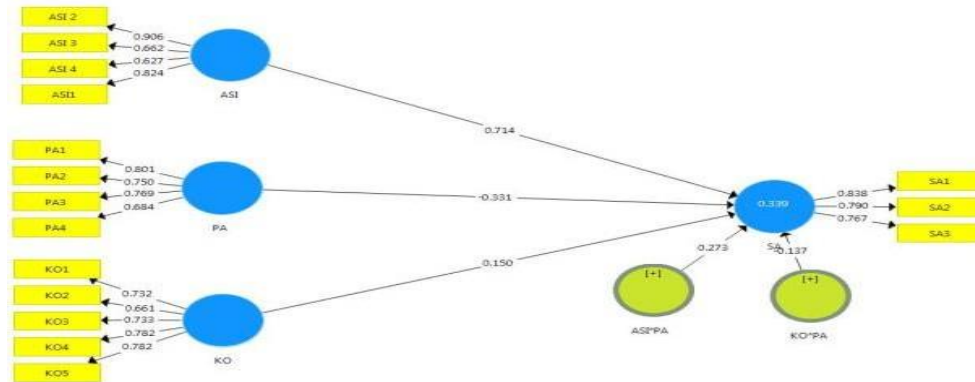
Komitmen Organisasi menunjukkan nilai rata-rata 3,96 dengan standar deviasi 0,84 dan dengan nilai jawaban reponden antara 1-5. Dalam hal ini para pejabat eselon IV dan Eselon III bagian penganggaran setuju bahwa Komitmen organisasi sangat berpengaruh pada proses penyusunan anggaran.

Kisaran jawaban responden menunjukkan nilai rata-rata (mean) tinggi pada variabel partisipasi anggaran dan komitmen organisasi. Sebaliknya untuk dua variabel yang lain, yaitu asimetri informasi dan senjangan anggaran menunjukkan nilai rendah. Hal ini memberikan indikasi awal adanya asimetri informasi dan senjangan anggaran yang rendah berimplikasi pada partisipasi anggaran dan komitmen organisasi yang tinggi.

Hasil Analisis Partial Least Square (PLS) dan Pengujian Hipotesis

Metode analisis yang dilakukan untuk mengetahui bentuk dan besar pengaruh variabel laten independen yaitu partisipasi anggaran terhadap variabel laten dependen yaitu senjangan anggaran dengan asimetri informasi, komitmen organisasi sebagai variabel moderasi adalah menggunakan Partial Least Square (PLS) yang diolah dengan SmartPLS 3.

Model PLS merupakan model keseluruhan dari model pengukuran (*measurement model* atau *outer model*) dan model pengaruh atau model struktural (*structural model* atau *inner model*). *Partial Least Square – Structural Equation Modelling* (PLS-SEM) digunakan dalam metode pengujian model keberpengaruhan dengan pendekatan tahap pertama (*first order*) yang diukur secara reflektif dari indikator-indikatornya. Hasil analisis PLS-SEM secara keseluruhan dalam bentuk diagram model PLS dapat dilihat pada



Gambar 1. Model PLS

Evaluasi outer model reflektif dilakukan berdasarkan 3 (tiga) kriteria yaitu *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *composite reliability*. Penjelasan evaluasi outer model, sebagai berikut:

Convergent Validity

Reliabilitas indikator dicerminkan dari nilai *loading* yang merefleksikan kekuatan interelasi antara konstruk *first order* terhadap indikatornya. Nilai *loading factor* untuk semua indikator di atas 0,5 menunjukkan indikator-indikator yang merefleksikan konstruk *first order*. Menurut Chin, 1998 (dalam Ghazali, 2006) untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai. Dalam penelitian ini akan digunakan batas loading factor sebesar 0,60.

Discriminant Validity

Discriminant validity menunjukkan nilai korelasi dengan konstruk *first order*. Jika indikator-indikator struktur memang menggambarkan refleksi dari first order struktur, maka nilai korelasi indikator-indikator tersebut haruslah lebih besar dibandingkan korelasi indikator-indikator tersebut terhadap konstruk first order lainnya.

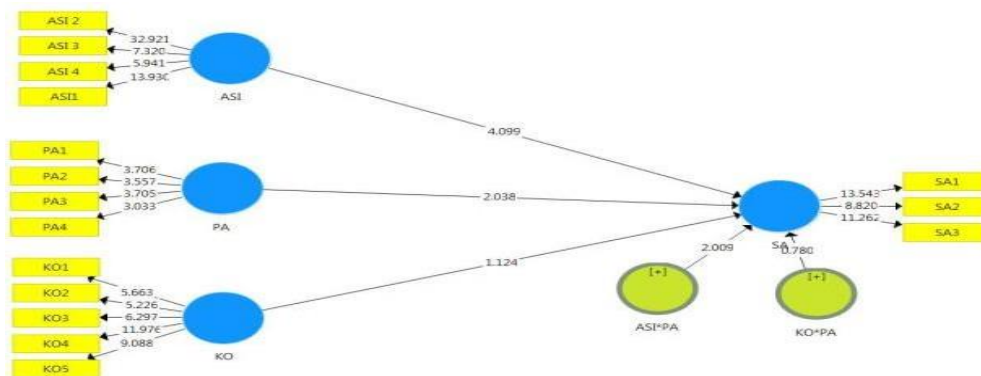
Composite Reliability

Nilai reliabilitas komposit pada *outer model* digunakan untuk mengukur kestabilan dan konsistensi internal indikator. Suatu *outer model* dinyatakan memiliki kestabilan dan konsistensi internal indikator, konstruk first model harus memiliki nilai composite reliability diatas 0,6 ($p < 0,05$).

Evaluasi Model Struktural atau *Inner Model* (Pengujian Hipotesis)

Setelah pengujian model pengukuran terpenuhi, maka selanjutnya adalah pengujian terhadap model struktural. Pengujian ini meliputi signifikansi hubungan jalur dan nilai R Square (R^2) untuk melihat hasil evaluasi model struktural, khususnya signifikansi dari variabel *moderating*. Nilai R^2 bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependennya. Jika R^2 untuk variabel Senjangan Anggaran sebesar 0.339. Hasil ini menunjukkan bahwa 33,9% perubahan yang terjadi pada Senjangan Anggaran dapat dijelaskan

oleh Partisipasi Anggaran, Asimetri Informasi, Komitmen Organisasi, sedangkan 66,1 % sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.



Gambar 2. Output Bootstrap

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS 3

Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat berguna mengenai hubungan antara variabel-variabel penelitian. Dapat diketahui bahwa hubungan partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran, dengan adanya partisipasi anggaran bawahan dalam proses penyusunan anggaran akan mengurangi kecenderungan untuk menciptakan senjangan anggaran. Dimana agen termotivasi untuk mengembangkan karir ke jenjang yang lebih tinggi dan meningkatkan kompensasinya dimasa mendatang. Senjangan anggaran diciptakan oleh perangkat daerah karena untuk menjaga hubungannya dengan kepala daerah dan mengamankan pekerjaan dan posisi dipemerintahan.

Sedangkan Asimetri informasi mampu memoderasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran bahwa pada OPD Provinsi Banten selaku manajer puncak yaitu kepala dinas harus ikut berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan anggaran, karena manajer tingkat bawah dimana dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian dan Kepala Seksi cenderung melakukan tindakan disfungsional dengan membuat senjangan anggaran yang dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan informasi yang dimiliki Kepala Dinas sebagai manajer puncak dan Kepala Bagian dan Kepala Seksi sebagai manajer tingkat bawah.

Ketidakseimbangan informasi ini sering asimetri informasi, dimana informasi yang diketahui oleh manajer tingkat bawah lebih lengkap dibandingkan atasannya.

Hal ini dikarenakan kepala bidang dan kepala seksi memiliki kapasitas lebih banyak terlibat langsung pada suatu kegiatan operasional sehari-hari, maka dari itu manajer tingkat bawah lebih mengetahui apa yang sesungguhnya dibutuhkan dan dihadapi dilingkup tanggung jawabnya. Untuk Komitmen organisasi tidak mampu memoderasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran dengan adanya komitmen yang tinggi kemungkinan terjadi senjangan anggaran dapat dihindari, sebaliknya individu dengan komitmen organisasi rendah akan mementingkan dirinya sendiri/kelompoknya . bahwa manajer yang memiliki pandangan positif dan berusaha berbuat yang terbaik demi kepentingan organisasi sehingga tingkat komitmen organisasi individu dapat mempengaruhi keinginan individu untuk tidak menciptakan senjangan anggaran, sebaliknya dengan komitmen organisasi yang rendah , maka kepentingan pribadi akan lebih diutamakan dan individu tersebut akan melakukan senjangan anggaran.

Dalam PLS pengujian secara statistik setiap hubungan yang dihipotesiskan dilakukan dengan menggunakan simulasi. Pengujian dengan bootstrap juga dimaksudkan untuk meminimalkan masalah ketidaknormalan data penelitian. Hasil pengujian dengan bootstrapping dari analisa PLS adalah sebagai berikut:

Pengujian Hipotesis 1 (Terdapat pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan

Anggaran)

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa hubungan variabel Partisipasi Anggaran (PA) pengaruh partisipasi anggaran terhadap Senjangan Anggaran(SA) menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar -0.331 dengan nilai t-hitung sebesar 2,038 nilai tersebut lebih besar dari t-table (1.960). hasil ini berarti bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap senjangan anggaran yang berarti sesuai dengan hipotesis pertama dimana terdapat pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. Hal ini berarti **Hipotesa 1 diterima**.

Pengujian Hipotesis 2 (Asimetri Informasi Mampu Memoderasi Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran)

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa hubungan variabel Asimetri Informasi (ASI) memoderasi pengaruh Partisipasi Anggaran (PA) terhadap Senjangan Anggaran (SA) menunjukkan nilai koefisien jalur bertanda positif sebesar 0.273 dengan nilai t-hitung sebesar 2,009 nilai tersebut lebih besar dari t-table (1.960). mencerminkan variabel asimetri informasi mampu memoderasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran , yang berarti hipotesis kedua dimana asimetri informasi memoderasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. Hal ini berarti **Hipotesis 2 diterima**.

Pengujian Hipotesis 3 (Komitmen Organisasi Tidak Mampu Memoderasi Pengaruh Partisipasi Anggaran Dengan Senjangan Anggaran)

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa hubungan variabel Komitmen Organisasi memoderasi pengaruh Partisipasi Anggaran dengan Senjangan Anggaran menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar -0,137 dengan nilai thitung sebesar 0,780 nilai tersebut lebih kecil dari ttable (1.960). hasil ini berarti bahwa komitmen organisasi tidak memoderasi pengaruh partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran, yang berarti tidak sesuai dengan hipotesis ketiga dimana komitmen organisasi memoderasi pengaruh partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran . Hal ini berarti **Hipotesis 3 ditolak**.

Pembahasan**Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran**

Berdasarkan hasil hitungan statistik, koefisien partisipasi anggaran sebesar -0,331. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi anggaran, maka senjangan anggaran yang terjadi akan semakin rendah. Hasil pengujian terhadap hipotesis 1 menunjukkan bahwa partisipasi anggaran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap senjangan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi anggaran, maka senjangan anggaran yang terjadi akan semakin rendah. Hal ini dapat dilihat dari nilai t-hitung yang lebih besar dari t-tabel (1,960) yakni sebesar 2,038. Bahwa mekanisme anggaran akan mempengaruhi perilaku bawahan yaitu mereka akan merespon positif atau negatif tergantung penggunaan anggaran. Bawahan dan atasan akan berperilaku positif apabila tujuan pribadi bawahan dan atasan sesuai dengan tujuan organisasi. Sebaliknya bawahan akan berperilaku negatif apabila anggaran tidak di administrasikan dengan tertib dan baik, sehingga bawahan dapat menyimpang dari tujuan organisasi, pada sektor publik pada penganggaran di pemerintahan tidak sepenuhnya tergantung pada karyawan.

Di organisasi pemerintahan, karyawan atau birokrat mengemban akuntabilitas ganda (*dual*

accountability), yakni bertanggungjawab kepada kepala organisasinya (di Pemda disebut SKPD/OPD atau kepala daerah) dan juga kepada masyarakat (yang diwakili oleh lembaga perwakilan atau DPRD). Oleh karena itu, makna partisipasi anggaran dalam sektor publik adalah keterlibatan SKPD/OPD dalam penyusunan anggaran daerah (APBD). Dengan demikian, Hipotesis H1 dalam penelitian ini diterima. Sejalan dengan Kartika (2013), Ardiana (2017) menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap senjangan anggaran.

Dalam penyusunan anggaran yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran adalah bawahan. Oleh karena itu bawahan dilibatkan langsung dalam menyusun anggaran maka dapat mencegah terjadinya senjangan anggaran. Keterlibatan bawahan dalam proses penyusunan anggaran untuk memperkecil kemampuannya dalam mencapai target anggaran. Dapat diartikan bahwa partisipasi pegawai dalam penyusunan anggaran akan membuatnya leluasa dalam menentukan pencapaian kinerjanya. Dengan demikian, apa yang akan dicapai digunakan untuk kepentingannya sendiri bukan kepentingan organisasi atau institusi. Selain itu hasil penelitian ini sejalan pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Irfan ,dkk (2016) Selain itu, tingginya partisipasi anggaran yang tidak diikuti dengan pengawasan oleh atasan, akan memungkinkan bawahan untuk melakukan senjangan anggaran yang semakin tinggi.

Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Yang Dimoderasi Oleh Asimetri informasi

Untuk pengujian pengaruh variabel partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran melalui asimetri informasi sebagai pemoderasi, dengan terlebih dahulu hasil pengujian pengaruh asimetri informasi terhadap senjangan anggaran. Pengujian pengaruh moderasi dilakukan dengan melihat probabilitas (*P Value*). Hasil pengujian pengaruh asimetri informasi terhadap senjangan anggaran menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,273 Nilai t-hitung diperoleh 2,009 nilai tersebut lebih kecil dari t-tabel (1,960). Hasil ini berarti bahwa asimetri informasi memiliki pengaruh terhadap senjangan anggaran.

Dari pengujian tersebut didapat nilai *P Values* sebesar 0.045 nilai tersebut lebih besar dari *P-Value* (0.05). Hasil ini menunjukkan bahwa *moderating effect* 1 mampu berpengaruh pada Senjangan Anggaran, maknanya asimetri informasi mampu memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran. Maka dengan demikian model pengaruh dari partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran melalui asimetri informasi dapat diterima. Dari kedua pengujian tersebut dapat dikatakan bahwa pada OPD Provinsi Banten selaku manajer puncak yaitu kepala dinas harus ikut berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan anggaran.

Manajer tingkat bawah dimana dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian dan Kepala Seksi cenderung melakukan tindakan disfungsional dengan membuat senjangan anggaran, yang dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan informasi yang dimiliki Kepala Dinas sebagai manajer puncak dan Kepala Bagian dan Kepala Seksi sebagai manajer tingkat bawah. Ketidakseimbangan informasi ini sering asimetri informasi, dimana informasi yang diketahui oleh manajer tingkat bawah lebih lengkap dibandingkan atasannya. Hal ini dikarenakan kepala bidang dan kepala seksi memiliki kapasitas lebih banyak terlibat langsung pada suatu kegiatan operasional sehari-hari, baik secara teknis tentang pekerjaan dan pemahaman lebih baik mengenai apa yang dapat dicapai di area tanggung jawab masing-masing, sehingga secara tidak langsung terjadi penurunan senjangan anggaran dikarenakan anggaran sudah tepat sasaran.

Hal ini disebabkan karena peraturan yang jelas mengenai tugas dan kewajiban setiap aparat termasuk aturan yang terkait informasi yang dimiliki oleh bawahan yang harus melaporkan kepada atasannya maupun kepada dinas instansi terkait anggaran, seperti dinas PPKAD, BAPPEDA dan LITBANG secara berkala, mengenai perkembangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di OPD Provinsi Banten.

Hasil penelitian ini sejalan pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Armaeni (2012)

menyatakan bahwa Manajer puncak harus berpartisipasi dalam meninjau dan mengesahkan anggaran, tanpa partisipasi aktif dalam proses pengesahan, akan besar godaan bagi para pelaksana anggaran untuk menyerahkan anggaran yang mudah dicapai.

Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Yang dimoderasi Oleh Komitmen Organisasi

Untuk pengujian pengaruh variabel partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran melalui komitmen organisasi sebagai pemoderasi, dengan terlebih dahulu hasil pengujian pengaruh komitmen organisasi terhadap senjangan anggaran. Pengujian pengaruh moderasi dilakukan dengan melihat probabilitas (*P Value*). Hasil pengujian pengaruh komitmen organisasi terhadap senjangan anggaran menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar -0,137 Nilai t-hitung diperoleh 0,780 nilai tersebut lebih kecil dari t- tabel (1,960). Hasil ini berarti bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh negatif terhadap senjangan anggaran. Dari pengujian tersebut didapat nilai *P Value* sebesar 0,436 nilai tersebut lebih besar dari *P-Value* (0.05).

Hasil ini menunjukkan bahwa *moderating effect* 2 tidak berpengaruh pada senjangan anggaran, maknanya komitmen organisasi tidak memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran. Berdasarkan hasil hitungan statistik, dapat disimpulkan bahwa Komitmen Organisasi Tidak Memoderasi Pengaruh Partisipasi Anggaran Dengan Senjangan Anggaran. Hal ini dapat dilihat dari nilai t-hitung yang lebih rendah dari t-tabel (1,96) yakni sebesar 0,786 . Dengan demikian, Hipotesis H3 dalam penelitian ini ditolak. Komitmen Organisasi Tidak Memoderasi Pengaruh Partisipasi Anggaran Dengan Senjangan Anggaran, partisipasi anggaran dapat merusak motivasi bawahan dan menurunkan usaha pencapaian tujuan organisasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu siapa yang seharusnya dilibatkan dalam penyusunan anggaran dan keputusan-keputusan apa saja yang memerlukan partisipasi.

Kelemahan yang lain yaitu dapat menciptakan partisipasi semu yaitu agen seakan- akan berpartisipasi tapi kenyataannya tidak, agen biasanya hanya dikumpulkan untuk dan diminta menandatangani anggaran yang telah disusun. Sehingga walaupun komitmen organisasi tinggi, belum mampu menurunkan senjangan anggaran, dikarenakan menurunnya motivasi dan semangat kerja serta agen seakan-akan berpartisipasi tapi kenyataannya tidak. Dalam partisipasi anggaran, komitmen organisasi juga sangat penting dalam memoderasi proses partisipasi anggaran tersebut. Sehingga individu termotivasi untuk mementingkan kepentingan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang akan menghindarkan dari senjangan anggaran. Sebaliknya jika komitmen organisasi rendah maka individu tidak bersungguh-sungguh dalam mencapai tujuan organisasi sehingga terjadi senjangan anggaran dalam organisasi tersebut.

Hasil ini sejalan dengan (Mowday *et al*, 1979) menyatakan bahwa komitmen organisasi menunjukkan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran (*goal*) yang ingin dicapai oleh organisasi. Selain itu hasil penelitian ini sejalan pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Latuheru, 2006) menyatakan bahwa komitmen organisasi mempunyai pengaruh negatif terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran dan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan, semakin besar komitmen organisasi menyebabkan menurunnya kecenderungan individu yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran untuk melakukan senjangan anggaran, atau dengan kata lain pengaruh interaksi antara komitmen organisasi dengan partisipasi anggaran dapat menurunkan kecenderungan manajer untuk

menciptakan senjangan anggaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan Smart PLS 3.0 dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Adanya pengaruh positif signifikan antara partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran pada Pemerintahan Provinsi Banten yang tinggi dapat meningkatkan senjangan anggaran.
2. Hasil pengujian terhadap asimetri informasi berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran hal ini membuktikan bahwa asimetri informasi variabel pemoderasi.
3. Sedangkan hasil pengujian komitmen organisasi menemukan bukti tidak mempengaruhi terhadap senjangan anggaran , sehingga komitmen organisasi bukan merupakan variabel pemoderasi.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan implikasi bahwa dalam proses penyusunan partisipasi anggaran dipemerintahan daerah dan pimpinan OPD ,perlu untuk dipertimbangkan faktor- faktor yang mempengaruhi partisipasi anggaran yang dapat berdampak pada senjangan anggaran yaitu asimetri informasi , komitmen organisasi.

Secara teoritis hasil penelitian memberikan penjelasan bahwa partisipasi anggaran yang tinggi di pemerintahan daerah justru meningkatkan senjangan anggaran. Dalam penelitian ini, ditemukan variabel yang bersifat situasional yang mempengaruhi hubungan partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran diantaranya asimetri informasi yaitu adanya perbedaan informasi antara agen dengan prinsipal, komitmen organisasi yaitu komitmen individu dalam organisasi. Kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap senjangan anggaran..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy, dan Afrah Junita. “Determinan Kinerja Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah.” *Akuntabilitas*, vol. 13, no. 1, 2020, hal. 109–24, <https://doi.org/10.15408/akt.v13i1.14953>.
- Belianus Patria Latuheru. “Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Kawasan Industri Maluku).” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, vol. 7, no. 2, 2005, hal. 117–30, <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/view/16447>.
- Effectiveness, Organizational, dan Peter Brownell. *Effectiveness*, Brownell massachusetts institute of tecnology 50 cambridge. no. WP 1104-80, 1980.
- Faria, Juliano Almeida de, dan Sônia Maria Gomes da Silva. “The Effects of Information Asymmetry on Budget Slack: An Experimental Research.” *African Journal of Business Management*, vol. Vol. 7, no. 13, 2013, hal. 1086–99, <https://doi.org/10.5897/AJBM2013.1641>.
- Harahap, Lenni Khotimah. “Analisis SEM (Structural Equation Modelling) Dengan SMARTPLS (Partial Least Square).” *Fakultas Sains Dan Teknologi Uin Walisongo Semarang*, no. 1, 2018, hal. 1.
- Herman, Achmad, et al. “Manajemen Investasi Dan Portofolio.” *Kanal*, vol. 3, 2023.
- Indah, Mursalini; wahyu. *Anggaran Perusahaan*. 2020.
- Irfan, Muh., et al. “Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran dengan Asimetri Informasi, Penekanan Anggaran dan Komitmen Organisasional sebagai Variabel Pemoderasi.” *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, vol. 17, no. 2, 2016, hal. 158–75, <https://doi.org/10.18196/jai.2016.0052.158-175>.
- Kartiwa, H. A. “Penyusunan Anggaran Pendapatan.” *Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Dan Arah Kebijakan Umum*, 2012, hal. 1–22.
- Laksana Hari, Bagus, et al. “Pengaruh Kompetensi, Independensi, Pengalaman Kerja, Kompleksitas Tugas Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Dan Reward Sebagai Variabel Moderating.” *Sorot*, vol. 10, no. 1, 2020, hal. 1, <https://doi.org/10.31258/sorot.10.1.3201>.
- Lis Setyowati, Laula Dwi M, Yulaikah, Mira Nurhikmat. “ANALISIS LAPORAN KEUANGAN.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., no. Mi, 2023.
- Mahadewi1, A. A. Sagung Sinta. “Organisasi Sebagai Pemoderasi.” *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, vol. 3, 2014, hal. 16.
- Maharani, Anak Agung Istri, dan Putu Agus Ardiana. “Pengaruh Partisipasi Penganggaran, Asimetri Informasi, dan Budaya Organisasi pada Senjangan Anggaran.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, vol. 12, no. 3, 2015, hal. 770–85.
- Margaret Ahituv, Niv, et al. “The effects of time pressure and completeness of information on decision making.” *Journal of Management Information Systems*, vol. 15, no. 2, 2019, hal. 153–72, <https://doi.org/10.1080/07421222.1998.11518212>.
- Maulidina, Hikmatul. “Organizational Commitment As A Moderating Variable In Local Government Agencies.” *The Effect Of Budget Participation And Budget Emphasis On Budget Slack With Organizational Commitment As A Moderating Variable In Local Government Agencies (Study*, no. 2, 2019, hal. 1–13.
- Mudawanah, S., 2019. *Determinan Motivasi, Partisipasi Anggaran, dan Komunikasi Terhadap Kinerja Organisasi dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening*. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 7(1), pp.47-56.
- Mudawanah, S. and Rahayu, M.M., *Implikasi Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Latar Belakang Sosial Ekonomi Terhadap Minat Calon Mahasiswa Program Studi Akuntansi STIE*

- La Tansa Mashiro dalam Keberlanjutan Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 11(1), pp.1-10.
- Pradita, Elma Octavia, dan Haryanto. “Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Asimetri Informasi Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada SKPD Se-Eks Karesidenan Kedu).” *Diponegoro Journal of Accounting*, vol. 6, no. 3, 2017, hal. 420–34.
- Swissia, Pebrina. “the Effects of Organizational Culture and Individual Capacity on Budgetary Slack Using Participative Budgeting As Moderating Variable At Ibi Darmajaya Lampung.” 1st International Conference on Information Technology and Business 2015, no. August, 2015, hal. 267–70, <https://jurnal.darmajaya.ac.id/index.php/icitb/article/view/469>.
- Taufiqurrohman, T., Mudawanah, S. and Muthanudin, M., 2021. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kabupaten Lebak. *Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis (The Indonesian Journal of Management & Accounting)*, 9(2).
- Yulaikah, Lia Nurliana, Asih Kurnianingsih. “Pengaruh Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan terhadap Profit Umkm Dan Keberlangsungan Umkm di Kabupaten Serang.” *The Asia Pacific War*, 2023, <https://doi.org/10.4324/9781315408026>.
- Yulaikah, Nurhikmat, Mira, dan Enji Azizi. “the Influence of Budget Participation on Budget Values With Asimetri Information, Organizational Culture As Moderate Variables (Case Study of Serang District Government).” *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, vol. 2, no. 4, 2021, hal. 274–90.